

ABSTRAK

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN KIP DI KAMPUNG LEBAK MANIS KOTA BANDAR LAMPUNG

(Triana Desita Sari, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, subyek yang diteliti merupakan kepala keluarga penerima KIP di kampung Lebak Manis, yang berjumlah 36 KK. Teknik pengumpulan data menggunakan angket tertutup dan angket skala *likert*, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan rumus interval dan persentase. Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, bahwa sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP adalah mendukung yaitu masyarakat telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur, yakni untuk membiayai iuran sekolah, transportasi sekolah, membeli pakaian dan perlengkapan sekolah seperti tas dan sepatu sekolah, untuk membiaya biaya tambahan praktik pembelajaran seperti ujian kompetensi dan latihan ujian, untuk membiayai les atau bimbingan belajar. Kecenderungan tindakan masyarakat juga positif atau mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalam hal ini benar diberikan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Kata kunci : sikap masyarakat, pemanfaatan, KIP,

ABSTRACT

THE ATTITUDE OF SOCIETY AGAINST THE USE OF KIP THE LEBAK MANIS VILLAGE IN BANDAR LAMPUNG

(Triana Desita Sari, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

The purpose of this research is to explain what are the policies of the community the use of indonesia smart card (kip) in their Lebak Manis sukajawa Baru the village Bandar lampung city .Methods used is descriptive quantitative, subjects in question was head of the recipient family KIP in their Lebak Manis, amounting to 36 families. Technique data collection use chief closed and chief likert scale, observation, and documentation. Data analysis using formulas interval and the percentage. Research results based on the data analysis anddetailed discussions, that if the community for the use of KIP are to support that is the community has use the money kip based on procedure Namely for finance school tuition, transportation school, buy clothes and school equipment like a bag and shoes school, to cost the additional costs practices learning as the test competence and training test, to finance les or early education. A tendency the act of the community also positive or support that the funds KIP provided on target or in this is true given to the people who weak economic .

Keyword: The attitude, society , the use of kip,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa akan dapat terwujud secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, maka pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta aspek lahiriah dan aspek rohaniah manusia. Itulah sebabnya pendidikan nasional dirumuskan sebagai usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan kehidupan bangsa menjadi lebih baik.

Begitu pentingnya pendidikan dalam memajukan suatu bangsa, namun dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bukan merupakan hal yang mudah, terdapat berbagai permasalahan yang mampu menghambat pendidikan. Keadaan pendidikan di Indonesia yang masih memperhatikan, mulai dari mutu pendidikan yang masih rendah yang dibuktikan oleh banyaknya guru yang mengajar bukan pada bidangnya serta tingkat kejujuran peserta didik yang masih rendah, kemudian fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang kurang memadai, hingga pemerataan pendidikan yang didasari oleh alasan ekonomi. Banyak anak yang tak dapat mengenyam pendidikan karena biaya yang sangat tinggi. Kemiskinan masih menjadi salah

satu alasan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia.

Berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak. Dengan mengeluarkan berbagai program-program, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada PKH, rumah tangga miskin diberi uang tunai sama dengan program BLT, kemudian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga disempurnakan dengan dikeluarkannya Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pendidikan yang memadai diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi pada orang tua dan keluarganya sehingga tidak berlanjut ke anak-anak generasi berikutnya.

Selain program PKH, BLT, BOS dan BSM upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menghalangi penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengeluarkan Program Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Adanya Program Indonesia Pintar mempunyai maksud untuk dapat memutus rantai angka putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu akan berjalan baik

apabila ada dukungan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah. Begitu juga dengan dikeluarkannya KIP, sikap masyarakat merupakan faktor yang penting agar dapat terlaksana peningkatan pendidikan pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ada tiga macam sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan yakni mendukung, netral dan menolak, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu warga kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru, kebanyakan masyarakat bersikap kurang mendukung Program Indonesia Pintar karena kebanyakan masyarakat menggunakan KIP tidak sebagaimana mestinya, dengan menggunakan KIP bukan untuk membiayai keberlangsungan pendidikan anak, melainkan menggunakannya untuk kepentingan lain seperti untuk membayar cicilan motor, membayar iuran listrik dan sebagainya.

Apa yang menjadi tujuan Program Indonesia Pintar, dan apa yang diinginkan pemerintah terhadap pemanfaatan KIP belum termanifestasikan di masyarakat, seharusnya pemanfaatan dana KIP adalah untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian atau seragam dan perlengkapan sekolah, pembayaran transportasi ke madrasah atau sekolah dan keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah atau sekolah seperti biaya untuk membeli media pembelajaran LKS, biaya yang dikeluarkan saat pembelajaran praktik misalnya saat pembelajaran portofolio dan sebagainya.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Sikap

Menurut GW Allport dalam Widiastuti (2014:57) “sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya”. Thustone dalam Ahmadi (2002:163), mengatakan “sikap adalah kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi

Berdasarkan pendapat ahli maka menurut peneliti sikap adalah keadaan mental dan saraf seseorang melalui pengalaman sehingga menimbulkan kecenderungan terhadap obyek tertentu yang bersifat positif atau negatif.

Komponen sikap menurut Sears dalam Widyastuti (2014:59), terdiri atas:

- 1).Komponen *kognitif* dalam suatu sikap terdiri dari keyakinan seseorang mengenai obyek tersebut bersifat evaluatif yang melibatkan diberikannya kualitas disukai atau tidak disukai, diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk terhadap obyek.
- 2).Komponen Perasaan dalam suatu sikap berkenaan dengan emosi yang berkaitan dengan obyek tersebut. Obyek tersebut dirasakan sebagai hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai. Beban emosional inilah yang memberikan watak tertentu terhadap sikap yaitu watak mantap,

tergerak dan termotivasi.

- 3). Komponen Kecenderungan Tindakan dalam suatu sikap mencakup semua kesiapan perilaku yang berkaitan dengan sikap. Jika seseorang individu bersikap positif pada obyek tertentu, maka ia akan cenderung membantu atau memuji/mendukung obyek tersebut. Jika bersikap negatif ia akan cenderung mengganggu atau menghukum atau merusak obyek tersebut.

Program Indonesia Pintar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 1, “Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM)”.

Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah “kartu yang diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan maksud untuk menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan sampai lulus ke jenjang pendidikan menengah”. Penerima manfaat program Indonesia Pintar pada kementerian pendidikan dan kebudayaan meliputi siswa Sekolah Dasar (SD) siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga warga belajar atau peserta yang berada di Kelompok Belajar (paket A/B/C)” (Permendikbud No. 12 Tahun 2015).

Penggunaan Dan Besaran Manfaat KIP

Berdasarkan Petunjuk Teknis PIP, manfaat bantuan Program Indonesia Pintar digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa yang meliputi:

- 1). Pembelian buku dan alat tulis;
- 2). Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah;
- 3). Pembayaran transportasi ke madrasah/sekolah; dan
- 4). Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah. Pihak madrasah ikut mengawasi penggunaan manfaat Program Indonesia Pintar sesuai peruntukannya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PIP Siswa madrasah atau sekolah yang menjadi sasaran Program Indonesia Pintar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan diberikan dana bantuan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- a). Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah : Rp.225.000,-/semester atau Rp. 450.000,-/tahun.
- b). Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah : Rp. 375.000,-/semester atau Rp. 750.000,-/tahun.
- c). Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah : Rp. 500.000,-/semester atau Rp. 1.000.000,-/tahun.

Pengambilan Dana

Berdasarkan Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/PP/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP

Tahun 2016, pengambilan/pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta didik/penerima kuasa di bank penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Virtual Account*

- a). Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga. Untuk peserta didik yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala sekolah/orangtua/wali.
- b). Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa dokumen sebagai berikut:
 1. Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga.
 2. Foto kopi KTP kepala sekolah/ketua lembaga.
 3. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga defenitif yang masih berlaku.
 4. Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM).

2. Rekening Tabungan

Sebelum pencairan/pengambilan dana, untuk rekening tabungan harus dilakukan aktivasi terlebih dahulu oleh peserta didik, dengan membawa:

- a). Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan
- b). Tanda pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah). Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala sekolah/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh

peserta didik penerima.

Pengambilan dana dapat dilakukan dengan cara:

- a). Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa tanda pengenal seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan buku tabungan.
- b). Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/paket A dan SMP/paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/paket C dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. Foto kopi KTP kepala sekolah/ketua lembaga.
 2. Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga defenitif yang masih berlaku.
 3. Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.
 4. Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM).
Pengambilan kolektif dapat dilakukan apabila penerima PIP berada di daerah yang sulit untuk mengakses kebank/lembaga penyalur (tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan/sekolah/tempat tinggal peserta didik), biaya transport pengambilan lebih besar/tidak seimbang dari bantuan yang akan diterima), atau cuaca buruk/kondisi lingkungan yang membahayakan siswa.
Dana yang sudah dicairkan oleh

penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menurut F.Hair dkk dalam Sangadji dan Sopiah (2010:21) “penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan atau prosedur. Penelitian deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya”. Sedangkan menurut Carmines dalam Sangadji dan Sopiah (2010:26), “penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik”.

Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika

kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2010:188). Menurut Suharsimi Arikunto (2010:120), “apabila subjek kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat di atas, karena subyek penelitian ini kurang dari seratus, maka diambil sebanyak 100% yaitu 36 orang yang merupakan KK dari penerima Kartu Indonesia Pintar di Kampung Lebak Manis.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi (Y) yaitu:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Definisi Operasional

- a. Sikap masyarakat adalah pemahaman, tanggapan dan kecenderungan bersikap yaitu positif atau negatif yang bersumber dari pengetahuan, pemahaman dan kecenderungan untuk bertindak.

- b. Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah penggunaan bantuan dana KIP di Kampung Lebak Manis dengan indikator:
- 1). Pembelian buku dan alat tulis
 - 2). Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah
 - 3). Untuk keperluan/biaya transportasi kesekolah
 - 4). Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran.

Pengukuran Variabel

- a. Sikap masyarakat dapat diukur berdasarkan 5 skala (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju) dengan indikator:
- 1). Komponen *Cognitive*
 - 2). Komponen *affective*
 - 3). Komponen *behavior* atau *conative*
- b. Pemanfaatan KIP dapat diukur melalui penilaian terhadap penggunaan dana dalam waktu 3 bulan, dengan melihat frekuensi:
- 1). Pembelian buku dan alat tulis
 - 2). Pembelian pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah
 - 3). Untuk keperluan/biaya transportasi kesekolah
 - 4). Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pokok

a. Angket

Untuk mengumpulkan data mengenai sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP menggunakan angket tertutup dan angket skala likert. Angket sendiri yaitu pengumpulan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia

menjawabnya” (Sangadji, 2010:193). Pada angket tertutup peneliti telah menyediakan jawaban yang harus dipilih oleh responden. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap responden diminta untuk menunjukkan tingkatan di mana mereka setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan dengan 5 (lima) pilihan skala (Ahmadi, 2002:186) :

- 1). setuju
- 2). sangat setuju
- 3). netral
- 4). tidak setuju
- 5). sangat tidak setuju

Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik observasi ini diambil untuk mendapatkan informasi penunjang data penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data penunjang dari objek penelitian.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum X &: 332 & \sum X^2 &: 11114 \\ \sum XY &: 12191 & \sum Y &: 367 \\ \sum Y^2 &: 13521 & N &: 10 \end{aligned}$$

3. Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur dan diperoleh koefisien korelasi dengan angka 0,97. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria Sangat Tinggi kemudian dapat dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP

No	Kelas Interval	Frek	%	Kategori
1	9-10	1	3%	Tidak Paham
2	11-12	3	8%	Kurang Paham
3	13-15	32	89%	Paham
Jumlah		36	100%	

Berdasarkan data yang diperoleh, pada indikator ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan KIP terdapat 1 responden (3%) kepala keluarga yang cenderung tidak paham, hal ini dikarenakan hanya mengetahui bahwa KIP adalah sebuah kartu yang diberikan pada masyarakat tidak mampu saja tetapi tidak memahami bahwa tujuan dari pemerintah mengeluarkan KIP adalah

untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Seharusnya pada indikator pemahaman terhadap pemanfaatan KIP peserta lebih memahami bahwa pemerintah mengeluarkan Program Indonesia Pintar yang diwujudkan melalui pendistribusian KIP adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan agar menurunnya angka putus sekolah sehingga dapat bijak menggunakan dana KIP.

Untuk kategori cenderung kurang paham diperoleh data 3 responden (8%), Hal ini dikarenakan peserta kurang memahami apa itu KIP, karena tidak ada sosialisasi mengenai hal ini sehingga mempengaruhi pemahaman kepala keluarga, diketahui bahwa kepala keluarga penerima KIP hanya mengikuti alur dari RT saja. Seharusnya sebagai penerima KIP, mereka juga ikut memahami tujuan Program Indonesia Pintar dan tujuan dana KIP yang disalurkan dua kali dalam satu tahun, tidak hanya mengikuti prosedur dari RT saja.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh yaitu menunjukkan 32 responden (89%) masuk dalam kategori paham. Hal ini dikarenakan mereka sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan dari dibentuknya Program Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan dikeluarkannya KIP. Serta memahami dengan baik prosedur agar dana KIP dapat dimanfaatkan atau dicairkan. Seharusnya selain peserta

tersebut paham tentang tujuan pemerintah mengeluarkan KIP tersebut namun peserta juga berperan aktif membantu pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program ini agar bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tercapai pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua agar meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Maka berdasarkan data hasil penelitian, menurut peneliti masyarakat yang dalam penelitian ini adalah kepala keluarga penerima KIP, sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pemanfaatan KIP, mereka telah memahami tujuan dibentuknya PIP dan dikeluarkannya KIP yang sejatinya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Hal ini juga didukung dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, mayoritas masyarakat yang menerima KIP telah memahami maksud dari pemerintah mengeluarkan KIP semata-mata hanya untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan baik itu kebutuhan langsung maupun tidak langsung yang dibebankan kepada peserta didik seperti iuran sekolah, biaya transportasi sekolah serta biaya kursus atau bimbingan belajar siswa. Oleh karena itu pemahaman yang sudah baik, artinya pemahaman masyarakat telah sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Masyarakat yang telah memahami dengan baik bagaimana seharusnya KIP digunakan diharapkan mampu mengantarkan masyarakat agar dapat bersikap sangat setuju atau mendukung program pemerintah untuk menggunakan dana KIP hanya untuk

keperluan yang berkaitan dengan pendidikan.

Pemahaman masyarakat yang sudah tinggi serta didukung oleh wawancara dan observasi yang menunjukkan hal yang sama pula, memungkinkan masyarakat akan menyikapi KIP dengan positif atau mendukung hal ini nampak pada sikap masyarakat yang memiliki kecenderungan menggunakan dana KIP untuk membayar iuran sekolah, membeli pakaian atau seragam sekolah, membeli alat tulis dan buku pelajaran, untuk biaya transportasi siswa kesekolah serta untuk membiayai kursus atau bimbingan belajar siswa. Namun disisi lain masyarakat juga ada yang belum memahami pemanfaatan KIP dengan baik, hal ini dapat diatasi dengan dilakukannya sosialisasi tentang bagaimana seharusnya KIP dimanfaatkan oleh pemerintah melalui instansi atau elemen masyarakat kepada penerima KIP sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak memahami pemanfaatan KIP yang sesuai ketentuan.

2. Perasaan atau Tanggapan Masyarakat terhadap Pemanfaatan KIP

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Perasaan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP

No	Kelas Interval	Frek	%	Kategori
1	15-16	1	2,7 %	Sangat Tidak Setuju
2	17-18	5	13,8 %	Tidak Setuju
3	19-20	10	28%	Netral
4	21-22	13	36,1 %	Setuju

5	23-24	7	19,4 %	Sangat Setuju
Jumlah		36	100 %	

Berdasarkan data yang diperoleh pada indikator ini menunjukkan bahwa 1 responden (2,7%) dalam kategori sangat tidak setuju, dikarenakan berdasarkan pengetahuan kepala keluarga penerima KIP yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat menggunakan dana KIP untuk keperluan hidup anak. Seharusnya dalam indikator tanggapan masyarakat ini, mereka sebagai penerima KIP mengetahui untuk apa hakikatnya dana KIP dapat digunakan.

Selanjutnya diperoleh data bahwa pada indikator ini terdapat 5 responden (13,8%) pada indikator tanggapan terhadap pemanfaatan KIP berdasarkan informasi cenderung tidak setuju, hal ini dikarenakan menurut mereka kebutuhan untuk memenuhi pendidikan anak sangat banyak sehingga hal itu bukan merupakan tanggung jawab orang tua dalam penggunaannya. Seharusnya pada indikator ini kepala keluarga setuju bahwa dana KIP sejatinya hanya dapat digunakan untuk membantu biaya pendidikan dan penggunaannya harus diawasi oleh orang tua.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh pada indikator tanggapan terhadap pemanfaatan KIP menunjukkan bahwa terdapat 10 responden (28%) cenderung dalam kategori netral, karena mereka telah memahami dan mengetahui bagaimana dana KIP harusnya dimanfaatkan, namun mereka netral ketika dihadapkan pada situasi yang mendesak seperti pada saat dana KIP sudah dicairkan kebetulan belum

membayar iuran listrik dan sebagainya.

Terdapat 13 responden (36,11%) kepala keluarga dalam kategori setuju, hal ini dikarenakan mereka sepakat kewajibannya sebagai penerima KIP yang ideal adalah menggunakan dana KIP untuk membeli alat tulis dan menyimpan uang yang tersisa, jadi apabila dikemudian waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti membutuhkan biaya SPP atau yang berkaitan dengan pendidikan yang lain tidak kebingungan. Seharusnya pada indikator ini, selain peserta tersebut paham tentang sikap yang harus dilakukan sebagai penerima KIP, tapi mereka juga harus setuju bahwa yang berkaitan dengan transportasi sekolah anak juga dapat menggunakan dana KIP.

Sebanyak 7 responden (19,4%) kepala keluarga masuk dalam kategori sangat setuju, hal ini berdasarkan informasi mereka mendukung penggunaan dana KIP sejatinya menjadi tanggung jawab orang tua yang dapat memilah mana yang menjadi kepentingan anak dalam menunjang pendidikannya. Serta sependapat bahwa dana KIP dapat membantu biaya transportasi anak yang mayoritas jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh.

Berdasarkan data hasil penelitian, maka menurut peneliti pada indikator perasaan atau tanggapan masyarakat sudah memiliki tanggapan yang positif atau setuju, hal ini didukung pula dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kepada masyarakat. Masyarakat telah mendukung penggunaan KIP sesuai dengan prosedur yakni untuk keperluan membeli alat tulis, transportasi ke sekolah, biaya bimbingan belajar

dan biaya pendidikan lainnya seperti untuk membiayai pembelajaran praktek misalnya digunakan untuk membeli perlengkapan tugas, yaitu karton, lem dan sebagainya yang berbeda jenis dan harganya setiap pembelajaran. Tanggung jawab orang tua juga dalam menggunakan KIP sudah positif, orang tua penerima KIP telah dapat mempergunakan KIP dengan efisien, sehingga dapat ditabung untuk keperluan pendidikan selanjutnya. Tanggapan masyarakat yang telah positif memungkinkan juga masyarakat akan bersikap mendukung PIP dengan memanfaatkan dana KIP dengan bijak hal ini dibuktikan mayoritas masyarakat menolak jika dana KIP digunakan untuk membeli pakaian. Oleh karena masyarakat yang sudah memiliki tanggapan yang baik terhadap pemanfaatan KIP, diharapkan terus konsisten dan tidak terpengaruh meski dihadapkan pada keadaan ekonomi yang sulit.

Disisi yang lain meskipun ada masyarakat yang memiliki tanggapan negatif terhadap pemanfaatan KIP, hal ini masih dapat diatasi karena jumlah penerima KIP yang memiliki tanggapan negatif tidaklah dalam jumlah yang banyak, meskipun begitu juga tidak dapat dibiarkan begitu saja, sehingga tidak ada pemanfaatan KIP yang menyeleweng dari tujuan dikeluarkan KIP itu sendiri. Hal yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pengawasan secara ketat, yang selama ini belum dilakukan oleh pemerintah, karena jika pemanfaatan KIP diawasi akan kecil kemungkinan adanya dana KIP yang diselewengkan atau tidak digunakan untuk keperluan pendidikan, misalnya saja guru yang mengontrol siswa dengan selalu menanyakan dan mengawasi pemanfaatan KIP dengan

menyesuaikan kebutuhan peserta didik, misalnya saja saat peserta didik membutuhkan buku untuk menunjang pembelajaran, hal ini dapat dikomunikasikan oleh guru kepada orang tua untuk membelikan buku tersebut dengan menggunakan dana KIP.

3. Kecenderungan Bertindak Masyarakat terhadap Pemanfaatan

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Kecenderungan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP

No	Kelas Interval	Frek	%	Kategori
1	30-32	1	2%	Sangat Tidak Setuju
2	33-35	2	5%	Tidak Setuju
3	36-38	10	28%	Netral
4	39-41	19	52%	Setuju
5	42-45	5	13%	Sangat Setuju
Jumlah		36	100%	

Berdasarkan data yang diperoleh, pada indikator ini menunjukkan kecenderungan bertindak terhadap pemanfaatan KIP terdapat 1 responden (2%) sangat tidak setuju, hal ini dikarenakan berdasarkan informasi menurut responden untuk pembelian atribut sekolah bukan manfaat dana KIP karena sekolah telah mengkoordinir masing-masing dan lebih baik digunakan untuk kebutuhan anak. Seharusnya pada indikator ini lebih bijak walaupun penerima KIP merupakan keluarga yang kurang mampu, tetapi memenuhi kebutuhan

hidup anak bukan merupakan manfaat dana KIP.

Kemudian selain itu berdasarkan data yang diperoleh pada indikator kecenderungan bertindak terhadap pemanfaatan KIP terdapat 2 responden (5%) kepala keluarga masuk kategori tidak setuju hal ini karena menurut mereka menggunakan dana KIP untuk keperluan pendidikan memang merupakan hal yang benar, tetapi membeli pakaian untuk anak yang berasal dari keluarga tidak mampu juga diperbolehkan karena itu juga merupakan kebutuhan anak, dan tidak digunakan untuk membeli LKS karena menurut mereka sudah diberikan dari sekolah. Seharusnya dalam indikator ini, kepala keluarga dapat membedakan mana kepentingan pendidikan dan mana yang merupakan kebutuhan hidup anak diluar pendidikan.

Terdapat 10 responden (28%) kepala keluarga masuk kategori netral, hal ini dikarenakan berdasarkan informasi menurut kepala keluarga untuk membiayai bimbingan belajar, membeli kamus dan untuk membayar biaya TRY OUT untuk mempersiapkan Ujian Nasional bagi anak yang duduk dikelas 3 adalah boleh-boleh saja. Seharusnya dalam indikator kecenderungan bertindak meskipun hal-hal tersebut merupakan suatu kebutuhan pendidikan, tetapi dalam penggunaannya orang tua harus dapat lebih selektif memilih mana hal yang lebih penting mengingat kebutuhan pendidikan sangat banyak.

Selanjutnya berdasarkan data pada indikator kecenderungan bertindak terdapat 19 responden (52%) masuk kategori setuju, hal ini karena peserta benar-benar menggunakan dana KIP

untuk keperluan pendidikan dan menyimpan ketika tidak digunakan serta mendukung pembelian kamus, membayar TRY OUT untuk mendukung Ujian Nasional setelah melakukan selektif menimbang kepentingan pendidikan yang akan datang. Seharusnya sebagai peserta paham dalam prosedur menggunakan dana KIP, dapat memberikan informasi sehingga penerima lain dapat menggunakan dana KIP lebih efisien.

Berdasarkan hasil skor pada indikator kecenderungan bertindak terhadap pemanfaatan KIP, terdapat 5 responden (13%) masuk kategori sangat setuju, hal ini dikarenakan mereka dalam menggunakan KIP setuju menjadi tanggung jawab orang tua dan peserta didik yang harus diawasi sekolah, mereka mendukung jika dalam pembelanjaan dana KIP terkait apapun bisa menggunakan nota pembelian yang ditunjukkan kepada sekolah. Seharusnya sebagai kepala keluarga penerima KIP yang memiliki apresiasi yang baik untuk mengawasi pembelajaan dana KIP, mereka hendaknya mengusulkannya kesekolah atau kepada dinas pendidikan, jika tidak dapat bertemu secara langsung dapat melalui website resmi yang dapat menindaklanjuti usulan tersebut.

Berdasarkan hasil angket penelitian dan juga didukung dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, masyarakat telah memiliki kecenderungan bertindak positif yang akan memunculkan sikap yang positif pula atau dalam hal ini setuju dengan pemanfaatan KIP yang digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk membiayai iuran sekolah, transportasi kesekolah, membeli perlengkapan sekolah seperti sepatu

dan tas sekolah, uang saku peserta didik, untuk membiayai kursus atau les tambahan bagi peserta didik serta untuk membiayai biaya praktik tambahan misalnya biaya Uji Kompetensi, dan Try Out atau latihan soal untuk menunjang Ujian Nasional. Oleh karena itu peneliti berharap agar masyarakat terus konsisten dalam menggunakan dana KIP hanya untuk keperluan pendidikan dan agar dapat mengajak penerima yang lain agar mampu memanfaatkan dana dengan bijak.

Disisi yang lain masyarakat yang belum cenderung bersikap positif terhadap pemanfaatan KIP perlu diatasi dengan diperbaikinya sistem pencairan dana KIP, tidak jarang orang tua dari penerima KIP yang mengeluh sudah datang jauh ke bank tetapi bank penuh dan harus kembali datang besok dan harus menunggu dengan rentan waktu yang cukup lama, hal ini dapat mendorong sikap apatis orang tua dalam menggunakan KIP, karena mereka memperoleh dana KIP dengan bersusah payah mereka akhirnya menggunakan dana KIP untuk keperluan yang lain terlebih dahulu baru untuk kepentingan pendidikan. Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan diserahkannya pengelolaan dana KIP oleh sekolah, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Budi Widodo (UNY, 2016) berdasarkan hasil penelitian beliau di SMK Cokroaminoto Pandak, dana KIP dikelola oleh sekolah untuk keperluan pendidikan siswa karena orang tua mengalami kesulitan saat mengontrol penggunaan dana sehingga digunakan untuk keperluan diluar pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP adalah mendukung hal ini berdasarkan hasil penelitian yaitu masyarakat telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur, yakni untuk membiayai iuran sekolah, transportasi sekolah, membeli pakaian dan perlengkapan sekolah seperti tas dan sepatu sekolah, untuk membiaya biaya tambahan praktik pembelajaran seperti ujian kompetensi dan latihan ujian, untuk membiayai les atau bimbingan belajar. Kecenderungan tindakan masyarakat juga positif atau mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalam hal ini benar diberikan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian kemudian saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Karena penerima KIP sudah mendukung, maka pemanfaatan KIP harus terus digunakan hanya untuk keperluan pendidikan seperti pada jenjang pendidikan SD untuk keperluan membeli seragam sekolah, buku tulis, buku pelajaran dan buku tambahan pelajaran seperti atlas, kamus dan sebagainya serta untuk membiayai bimbingan belajar, kemudian pada jenjang pendidikan SMP dan

- SMA dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, LKPD, buku pelajaran, buku pemantapan ujian nasional, untuk membiaya ujian kompetensi dan biaya lainnya. sehingga apa yang diharapkan pemerintah, agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya.
2. Agar penggunaan dana KIP sesuai prosedur perlu adanya pengawasan melalui sekolah, dengan benar-benar mengawasi pemanfaatan KIP dengan cara menyesuaikan kebutuhan peserta didik, misalnya saja saat peserta didik membutuhkan buku untuk menunjang pembelajaran, hal ini dapat dikomunikasikan oleh guru kepada orang tua untuk membelikan buku tersebut dengan menggunakan dana KIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud. 2015. *Permendikbud No 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud.
- Kasubag Hukum Ditjen Dikdasemen. 2016. *Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/PP/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2016*. Jakarta: Kasubag Hukum Ditjen Dikdasemen.
- Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Widodo, Budi. 2016. *Evaluasi Pemanfaatan Progam Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Mandak*. *Journal. Student UNY*. Volume V. (Diakses pada 24 Januari 2017).
- Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.